

Judul : Perluas akses pendidikan, kampus swasta butuh bantuan operasional
Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Perluas Akses Pendidikan

Kampus Swasta Butuh Bantuan Operasional

KETUA Komisi X DPR Hetifah Sjaifudien menyampaikan catatan akhir tahun bidang pendidikan tinggi sebagai refleksi atas berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi. Dia menilai, masih ada ketimpangan yang tampak jelas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kata Hetifah, PTN berlomba meningkatkan jumlah mahasiswa hingga puluhan ribu per tahun. Tapi, pada praktiknya, kampus justru belum optimal jadi pusat keunggulan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada terciptanya persaingan kurang sehat dengan PTS.

"Terutama karena PTN, khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH), memiliki keleluasaan dan dukungan anggaran yang lebih besar," kata Hetifah dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Pada, selama ini PTS berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan

tinggi, khususnya di daerah, meskipun tanpa dukungan APBN yang memadai. Selanjutnya, sebagai bentuk keberpihakan, Komisi X DPR secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif bagi PTS.

Pertama, memperjuangkan pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS yang selama ini hanya dinikmati PTN melalui BOPTN. Kebijakan ini bisa meringankan beban operasional PTS serta biaya pendidikan mahasiswa, dengan prinsip keadilan setara seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"BOPT untuk semua PT merupakan ikhtiar untuk memastikan PTS juga mendapatkan jaminan negara, sehingga akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi tetap terjaga," jelasnya.

Kedua, keberpihakan diarahkan pada para pendidik, khususnya dosen non-ASN yang mayoritas mengabdikan PTS.



Hetifah Sjaifudien

Pihaknya secara aktif mendorong peningkatan kesejahteraan dosen non-ASN, termasuk penyesuaian tunjangan profesi agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar dengan dosen ASN di PTN.

"Kualitas pendidikan tinggi sangat ditentukan kesejahteraan dosennya. Ketimpangan perlakuan terhadap dosen PTS merupakan persoalan serius yang harus segera dikoreksi," tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Senayan juga terus memperjuangkan peningkatan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa PTS. Program ini dinilai penting untuk memastikan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan status perguruan tinggi.

Pihaknya mendorong agar regulasi ke depan mampu mengurangi beban finansial mahasiswa dan kampus. Regulasi itu juga bisa menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang seimbang antara PTN dan PTS, baik dari sisi pendanaan, tata kelola, maupun peran strategis.

"2026 harus jadi momentum perbaikan tata kelola pendidikan tinggi. Bukan sekadar mengejar angka dan kuantitas, tapi mengembalikan kampus sebagai pusat keunggulan, keadilan, dan pencerahan bangsa," ucapnya.

Anggota Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi menambahkan, pembangunan SDM

Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan PTN. Keberadaan PTS yang jumlahnya lebih banyak dan tersebar di seluruh pelosok Tanah Air juga memegang peran strategis. Selama ini, perhatian Pemerintah cenderung lebih besar kepada PTN.

"Tidak boleh ada diskriminasi antara PTN dan PTS. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan yang setara," tegas politikus PKB itu.

Terkait persaingan PTN-PTS, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendik-tisaintek) Stella Christie menilai, kuota seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan. Yang perlu dipikirkan adalah memberikan peluang paling banyak dan terbaik bagi semua masyarakat Indonesia untuk belajar.

"Kalau misalkan PTN bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa bisa kuliah, selalu kita dukung. Sama dengan PTS, agar mahasiswa kita di Indonesia semuanya bisa kuliah, bisa belajar," kata Stella. ■ PYB